

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam **pelaksanaan proses pendidikan sekolah**, tidak lagi menjadi **pelengkap**, tetapi sudah menjadi satu kesatuan dan **mata rantai** yang tidak terpisah dengan **sistem pembelajaran**. Di sekolah perlu diterapkan bimbingan dan konseling oleh guru BK kepada anak didik. Untuk mencapai perkembangan diri yang optimal, dalam kelembagaan sekolah diwujudkan dengan adanya bidang pelayanan pendidikan, salah satunya adalah pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dari Prayitno dan Amti (2004:114), bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latarbelakang yang ada (seperti latarbelakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Sejak tahun 1993 penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu bimbingan dan konseling Pola-17 (Prayitno, 2004). BK Pola-17 merupakan pola dasar dalam BK yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pola ini meliputi empat bidang bimbingan yaitu: a) Bidang pribadi, b) Bidang sosial, c) Bidang belajar, dan d) Bidang karir. Sembilan layanan bimbingan dan konseling yaitu: a) Layanan orientasi, b) Layanan informasi, c) Layanan konten, d) Layanan penempatan dan penyaluran,

e) Layanan konseling perorangan, f) Layanan bimbingan kelompok, g) Layanan konseling kelompok, h) Layanan konsultasi, dan i) Layanan mediasi. Adanya kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yaitu: a) Aplikasi instrumentasi data, b) Himpunan data, c) Konferensi kasus, d) Kunjungan rumah, dan e) Ahli tangan kasus.

Semua kegiatan khusus diatas memiliki tujuan dan pola pelaksanaan yang berbeda, namun semuanya dilakukan tidak lain untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Maka dari itu pentingnya seorang Guru BK memahami yang menjadi bidang tugas bagi Guru BK sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jika pola 17 plus bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dengan maksimal dan dipahami oleh Guru BK, terprogram dan berkualitas, dapat menunjang hasil belajar siswa. Pelaksanaan bimbingan dan konseling pola 17 plus tersebut dapat maksimal apabila dalam kurikulum diberikan alokasi waktu minimal 1 jam pelajaran, sehingga empat bidang bimbingan, sembilan layanan, dan lima kegiatan pendukung dapat diberikan pada seluruh siswa dan bukan pada siswa yang bermasalah saja.

Pemahaman menurut Tyler sebagai usaha merenggut makna secara jelas dan lengkap terhadap apa yang telah dijelaskan. Pemahaman Guru BK tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang tertib dan lengkap, akan menjadikan sedikit kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Peranan pemahaman sangat penting bagi Guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Adanya pemahaman Guru BK tentang layanan bimbingan dan konseling, maka Guru BK dapat

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan baik dan kemungkinan hanya terjadi sedikit kesalahan dalam pelaksanaannya.

Kompetensi Akademik calon Guru BK meliputi kemampuan (a) mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani, (b) menguasai khasanah teoretik konteks, asas, dan prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, (c) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (d) mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Pembentukan kompetensi akademik calon konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang S-1 bimbingan dan konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan dengan kekhususan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan hasil dari pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa penelitian terkait dengan keterampilan Guru BK di sekolah menunjukkan perilaku Guru BK yang kurang profesional. Penelitian oleh Asrori, M. (1990) menunjukkan bahwa kinerja petugas bimbingan yang termasuk kategori 'tinggi' dan termasuk kategori 'sedang'. Guru BK dianggap oleh siswa masih belum memiliki kemampuan seperti yang diharapkan dalam aspek pelaksanaan yang kurang memuaskan. Sedangkan Nurhisn, A.J. (1993) dalam penelitiannya menemukan pelaksanaan oleh Guru BK dalam bimbingan dan konseling belum sesuai dengan yang diharapkan, yakni masih kurangnya kemampuan dalam memahami bimbingan dan konseling dan menangani masalah yang dihadapi siswa.

Hasil studi di beberapa SMU Negeri (Nurhisn, A.J, 1998) menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman Guru BK dengan layanan bimbingan dan

konseling yang dilaksanakan. Melalui studi ini juga diperoleh bukti sistem layanan bimbingan di SMU Negeri tersebut masih perlu ditingkatkan. Radam (dalam Murad, 2003) melakukan penelitian di SMA Negeri Samarinda memperoleh hasil masih bercampur aduk mekanisme kerja dan penggunaan ruang kerja Guru BK dengan guru bidang studi. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi pemeliharaan kerahasiaan siswa, sehingga hak siswa yang mestinya di pelihara untuk menunjukkan kepercayaan terhadap profesionalisme Guru BK kurang baik.

Terdapat beberapa yang mempengaruhi pemahaman salah satunya adalah latarbelakang pendidikan Guru BK dan non Guru BK. Ketenagakerjaan Guru BK haruslah memiliki atau berlatarbelakang kependidikan sarjana Bimbingan dan Konseling. Karena dengan berlatarbelakang pendidikan BK, setidaknya Guru BK memahami tehnik atau cara khusus dalam memberikan bimbingan, dengan demikian proses bimbingan dan konseling akan lebih efektif apabila Guru BK memiliki latarbelakang pendidikan S1 BK. Sebaliknya yang bukan berlatarbelakang pendidikan BK (non BK), ditunjuk kepala sekolah selain menjadi guru pengajar mata pelajaran, dapat merangkap jabatan menjadi guru BK tanpa melalui proses penilaian tertentu. Dengan rangkapan jabatan tersebut guru pengajar dan guru BK tersebut terkadang bingung dalam membagi waktu mengajar dan melakukan tugasnya sebagai guru BK. Selain itu, guru BK juga kadang-kadang bingung dalam melakukan suatu proses layanan bimbingan konseling, karena dia kurang begitu paham, sehingga proses bimbingan biasanya dilakukan apabila baru terjadi permasalahan, dan biasanya melakukan penanganan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Guru BK yang sangat sedikit mempengaruhi tidak adanya pengangkatan calon guru BK oleh instansi pemerintahan yang mengakibatkan sekolah atau instansi pendidikan mau tidak mau harus menunjuk salah satu dari beberapa guru pengajar disekolahnya untuk merangkap tugas menjadi seorang Guru BK. Banyak ditemukan di sekolah-sekolah bahwa guru mata pelajaran menjadi guru BK (non BK), ini akan berdampak kurang baik dalam pemberian bimbingan dan konseling, karena non BK kurang memahami bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran tidak memahami dan tahu cara tehnik pendekatan yang dilakukan dalam menangani suatu permasalahan, karena guru mata pelajaran bukan berlatarbelakang pendidikan BK, sehingga biasanya dalam memberikan bimbingan mereka dengan cara kepribadiannya masing-masing, ini sangat mempengaruhi sekali dalam meningkatkan layanan BK di sekolah, karena hasil yang dicapai kurang begitu maksimal.

Berdasarkan fenomena dari penjelasan diatas yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan pelaksanaan BK di sekolah, maka penulis ingin mengungkapkan bagaimana pemahaman dan **implikasinya dilapangan** terhadap **murid di SMA Kabupaten Langkat**. Maka penulis memberi judul dalam penelitian ini adalah "**Studi Deskriptif Pemahaman Guru BK Tentang Bimbingan Dan Konseling Di SMA Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2012/2013**".

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang penerapan program bimbingan dan konseling disuatu pendidikan, maka penulis membatasi pembahasan hanya dalam bidang pemahaman Guru BK tentang bimbingan dan konseling di SMA kabupaten langkat tahun ajaran 2012/2013. Dalam hal ini, pemahaman Guru BK hanya dibatasi dalam menerapkan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah.

C. Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa-apa saja yang menghambat guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
2. Bagaimana pemahaman guru BK tentang bimbingan dan konseling.
3. Apa saja usaha guru BK untuk memahami bimbingan dan konseling secara mendalam di SMA kabupaten langkat.

D. Perumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pemahaman Guru BK Tentang Bimbingan dan Konseling dilihat dari latar belakang Pendidikan Guru BK Di Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2012/2013”?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Bimbingan Dan Konseling Di SMA Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2012/2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan wawasan keilmuan dibidang Bimbingan dan Konseling.

2. Praktis

- a) Sebagai masukan bagi Guru BK untuk lebih meningkatkan pemahamannya tentang bimbingan dan konseling di sekolah.
- b) Dengan penelitian ini, mahasiswa BK dapat meningkatkan pemahaman tentang bimbingan dan konseling.